

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

Betrix Priscilla Fermamdez
NPP. 29. 1318

*Asdaf Kabupaten Timor Tengah Utra Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: fernandezicha79@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The General Election is a democratic party for the Indonesian people where in the general election the choices of the Indonesian people can be channeled properly so that people are expected to participate in general election activities in Indonesia. but in reality there are still many people who do not participate in general election activities in various regions which result in the level of participation in these areas not meeting national standards. This also happened in Timor Tengah Utara Regency during the 2020 Regional Head Election* **Purpose:** *The purpose of this study is to find out the causes of the low level of community participation in Timor Tengah Utara Regency and identify strategies from the KPU to increase political participation of the people of Timor Tengah Utara Regency in the upcoming elections* **Method:** *This study uses a qualitative method with a descriptive approach and interview data collection techniques and documentation studies.* **Result:** *. Based on the results of the study, it can be seen that there are factors that influence the decline in the level of political participation of the people of Timor Tengah Utara, namely socio-economic, level of political knowledge, and inhibiting factors consisting of internal and external factors.* **Conclusion:** *.The strategy of the KPU itself to increase political participation of the people of Timor Tengah Utara is to increase socialization in a more creative way to attract public interest in politics, use Democracy volunteers such as traditional and religious leaders to carry out socialization as the party closest to the community and carry out socialization in the form of an introduction to the community through social media that is currently well-known among the public. The suggestion from the author is that the KPU should increase its programs and socialization that are useful and interesting as well as training on the use of technology for the community to increase people's political participation.* **Keywords:** *Political participation, , General Election Commission, Strategy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilihan Umum merupakan pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia dimana dalam pemilihan umum pilihan dari masyarakat Indonesia dapat tersalurkan dengan baik sehingga diharapkan agar masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum di berbagai daerah yang mengakibatkan tingkat partisipasi di daerah tersebut tidak memenuhi standar nasional. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 lalu. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dan mengidentifikasi strategi dari KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara pada pemilu yang akan datang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat Timor Tengah Utara ialah sosial ekonomi, tingkat pengetahuan politik,serta faktor penghambat yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. **Kesimpulan** Strategi dari KPU sendiri untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Timor Tengah Utara ialah dengan memperbanyak sosialisasi dengan cara yang lebih kreatif agar menarik minat masyarakat dalam politik, menggunakan para relawan Demokrasi seperti tokoh adat dan agama untuk melakukan sosialisasi sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat serta melakukan sosialisasi berupa pengenalan kepada masyarakat melalui media sosial yang sedang terkenal dikalangan masyarakat. Saran dari penulis ialah agar KPU memperbanyak program serta sosialisasi yang berguna dan menarik serta pelatihan penggunaan teknologi bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. **Kata kunci:** Partisipasi politik, Komisi Pemilihan Umum, strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi di Indonesia. partisipasi politik sendiri merupakan keterlibatan warga negara atau masyarakat dalam semua kegiatan politik di suatu negara. Partisipasi politik juga merupakan hal legal bagi warga negara yang menjadi fokus pemerintah untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Seiring berjalannya waktu demokrasi tersebut semakin berkembang dan menyesuaikan era globalisasi. Demokrasi pada masa kini bukan hanya tentang bagaimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat namun juga tentang demokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tersebut sehingga dari demokrasi kekinian tersebut masalah-masalah kebangsaan bisa terjawab. Partisipasi politik juga bertujuan untuk

mempengaruhi keputusan juga kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah agar menguntungkan berbagai pihak sehingga bentrok antar pemerintah dan masyarakat seperti yang sering terjadi.

Partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara demokrasi dapat terwujud melalui banyak hal salah satunya adalah pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu. Sebagai sebuah negara demokrasi keniscayaan tersebut dapat dilihat dari pemberlakuan pemilihan umum (pemilu) dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota.

Pemilu sendiri berarti proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu dapat berupa pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan sebagainya. Pemilu pertama kali diadakan di Indonesia pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Dengan diadakan pemilu tersebut, langkah awal menuju perwujudan negara demokrasi Indonesia mulai berjalan walau perlahan. Meskipun pemilu merupakan standar minimal atau prosedural sebagai negara demokratis, namun Pemilu merupakan pesta demokrasi Indonesia dimana dengan diadakan pemilu maka arti penting demokrasi Indonesia yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara sendiri dapat terwujud. Salah satu bentuk pemilu di tingkat daerah ialah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kepala daerah dan wakil kepala daerah Sebelum tahun 2005 dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Setelah dikeluarkan dan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 maka kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten pertama yang melaksanakan pilkada yaitu pada tahun 2005.

Pelaksanaan pilkada sendiri wajib bagi seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali salah satunya di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Pilkada pertama di Timor Tengah Utara dilaksanakan pada 2005 yang menghasilkan bupati dan wakil bupati. pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam proses pemilihan pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pilkada terutama masyarakat yang telah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar menggunakan hak pilihnya. Meskipun sudah memiliki hak pilihnya tetap saja pada faktanya masih terdapat masyarakat yang memilih untuk menjadi golongan putih. Golongan putih (golput) sendiri merupakan suatu sikap untuk tidak berpartisipasi dengan tidak memilih calon yang ditawarkan dalam pemilu. Setiap pemilu pemerintah selalu mengupayakan agar angka golongan putih terbilang kecil. Kenyataannya angka golongan putih (golput) dalam pilkada di kabupaten Timor Tengah Utara terhitung meningkat antara pilkada tahun 2015 dengan pilkada tahun 2020 dan masih belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan.

Angka golongan putih yang terus meningkat ini menjadi suatu permasalahan dan penghalang bagi berjalannya demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten

Timor Tengah Utara. Masalah terkait peningkatan jumlah golongan putih pada pilkada di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat kita lihat dalam perbandingan jumlah golongan putih pilkada 2015 dan 2020 pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data suara sah dan tidak sah pilkada
Tahun 2015 dan 2020

No	Jenis suara	Tahun		Persentase	
		2015	2020	2015	2020
1	Suara sah	94.002	132.196	87,62%	76,69%
		Suara	suara		
2	Suara tidak sah	13.281	40.189	12,38%	23,31%
		Suara	suara		
	jumlah	107.283	172.385	100%	100%
		suara	suara		

Sumber : <https://kupang.tribunnews.com/2020/12/17/partisipasi-pemilih-pada-pilkada-ttu-tahun-2020-tidak-sesuai-dengan-target-nasional>
<https://pilkada2015.kpu.go.id/ttukab>

Dari tabel diatas, terlihat dengan jelas bahwa terjadi peningkatan angka golongan putih dari pilkada tahun 2015 ke tahun 2020, jika dilihat dari jumlah suara sah dan suara tidak sah serta persentase yang telah tercantum di tabel tersebut. Keadaan ini lebih disebabkan oleh berbagai faktor dan dari berbagai pihak ditambah lagi dengan kondisi covid-19 pada desember tahun 2020 lalu di Kabupaten Timor Tengah Utara memuncak.

Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang tinggi, pemerintah mempunyai peran penting untuk mewujudkan hal tersebut. Bukan hanya pemerintah namun kesadaran dari masyarakat sendiri juga sangat diperlukan dan merupakan pendorong utama untuk terwujudnya partisipasi yang tinggi tersebut. Hanya saja kesadaran yang diharapkan dari masyarakat masih bisa dikatakan sangat kurang sehingga angka golongan putih masih meningkat dalam setiap pemilu. Maka dari itu upaya dari berbagai pihak masih harus terus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kegiatan pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal selalu dihadapkan dengan permasalahan penurunan tingkat partisipasi masyarakat dimana dilihat dari meningkatnya angka golongan putih. Pada pemilihan umum serentak pada tahun 2020 di kabupaten Timor Tengah Utara lalu terjadi peningkatan angka golongan putih dari bila dibandingkan dengan tahun 2015 lalu. Dimana pada 2015 jumlah golongan putih ialah 12,38% sedangkan pada 2020 meningkat menjadi 23,31%, Hal ini menjadi menarik untuk di teliti karena melihat peningkatan ini apakah ada faktor yang mempengaruhi ataukah kurangnya pihak yang berkaitan

dalam pelaksanaan tugasnya dalam penunjang kegiatan pemilihan umum serta adakah strategi yang dilakukann untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat

1.3. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017” yang di tulis oleh Fadil Anugrah Prasetyo (2018). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dikemukakan dalam penghitungan koefisien korelasi. Faktor Fisiologis tidak ada hubungan signifikan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru.
2. Penelitian berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar” oleh Ni Ketut Arniti (2020). Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Adapun hasil dari penelitian ini ialah, peta partisipasi pemilih dalam pileg dan pilpres di kota Denpasar mengalami kenaikan dan penurunan. Kedua, upaya sosialisasi partisipasi politik yang merupakan bagian paling penting dalam sebuah pemilihan umum. Friendmen dan Hechter melihat adanya pengaruh Lembaga sosial dalam partisipasi politik dalam temuan penelitian terhadap Lembaga sosial dalam partisipasi politik.
3. Penelitian oleh Mambang Rudu (2020) yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Katingan”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulannya ialah bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti kampanye, namun kurang dalam memberikan hak suara. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan politik transaksional dan masih kurangnya kesadaran politik masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Beberapa penelitian pada tabel di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai tema yang diteliti yaitu tentang partisipasi politik masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah mengenai objek dan tempat penelitian serta penambahan metode dimana penulis menggunakan metode analisis SWOT untuk meneliti strategi. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus ke faktor yang mempengaruhi peningkatan angka suara tidak sah atau golongan putih dan tempatnya juga berbeda dengan keempat penelitian di atas

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengidentifikasi penyebab dari rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Untuk mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk pemilihan umum yang akan datang.

II. METODE

Menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penulisan skripsi agar penyampaian gambaran berdasarkan fakta-fakta lapangan menjadi lebih jelas, teliti, dan lengkap. Serta menggunakan metode analisis SWOT dalam penelitian terhadap strategi agar lebih runtun

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Kabupaten TTU adalah salah satu Kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara astronomis, posisi Kabupaten TTU terletak di antara 9° 02' 48" dan 9° 37' 36" Lintang Selatan (LS) serta antara 124° 04' 02" dan 124° 46' 00" Bujur Timur (BT) yang terletak di daratan Timor dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Selatan: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Sebelah Utara: berbatasan dengan wilayah Ambeno Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Laut Sawu
- Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan
- Sebelah Timur: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Pada tahun 2020 diadakan pemilihan Kepala Daerah serentak yang seharusnya diikuti oleh 172.356 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap di 24 kecamatan di kabupaten timor tengah utara namun yang terdaftar mengikuti pemilihan Kepala daerah serentak pada 2020 lalu ialah 132.196 dari jumlah daftar pemilih tetap yang telah terdaftar di TPS masing-masing.

Dengan menggunakan teori dari Rosnia Gosamgo tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan tingkat partisipasi yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu:

3.1 Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi merupakan letak kedudukan atau posisi seseorang didalam suatu kelompok masyarakat yang dimana penentu dari posisi tersebut ialah jenis aktivitas ekonomi (pekerjaan), Pendidikan, serta kedudukan keluarga. Berdasarkan pengertian diatas terdapat tiga indikator yaitu tingkat pendidikan, pengaruh keluarga, serta pekerjaan yang akan diuraikan penulis sebagai berikut:

a) Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang yang dalam hal ini adalah tingkat pendidikan politik sangat mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik pula seseorang mencerna dan menerima informasi politik yang bisa menciptakan minat dan ketertarikannya terhadap masalah politik termasuk pemilihan umum.

b) Kuatnya Pengaruh Keluarga

Karena keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar maka keluarga mempunyai pengaruh besar dalam partisipasi politik seseorang maupun pilihan seseorang. Apabila kepala keluarga aktif dalam kegiatan politik di daerah tempat tinggalnya, otomatis anggota keluarganya juga akan turut aktif dalam kegiatan politik yang ada dan sebaliknya.

3.2 Tingkat Pengetahuan Politik

Pengetahuan politik merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dimana dengan adanya pengetahuan yang baik tentang politik oleh masyarakat maka keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik akan semakin tinggi. Penulis telah menguraikan beberapa indikator terkait pengetahuan politik dibawah ini:

a) Minimnya Komunikasi Politik antara Pemerintah dan masyarakat

Komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat merupakan interaksi antara dua pihak tersebut yang akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Apabila terjalin dengan baik komunikasi tersebut dan respon dari masyarakat juga baik maka tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi dan juga sebaiknya apabila komunikasi yang berjalan kurang baik maka begitu juga dengan tingkat partisipasi masyarakat.

b) Kurangnya Pemahaman Modernisasi

Faktor modernisasi dalam segala bidang dapat memberikan dampak kepada masyarakat dimana kemampuan masyarakat dalam mengimbangi dan menerima modernisasi tersebut akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat

3.3 Faktor Penghambat

Terdapat dua faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik dari masyarakat Kabupaten TTU yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kelompok masyarakat itu sendiri. Penulis membagi faktor internal menjadi dua bagian yaitu:

a) Tuntutan Pendidikan

Pengetahuan berupa pendidikan merupakan hal yang harus dimiliki masyarakat supaya bisa memahami dan ikut serta dalam kegiatan politik sendiri.

b) Pengaruh Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hal yang sangat besar pengaruhnya dalam partisipasi politik masyarakat. Dimana jenis dan tepat bekerja seseorang akan menentukan pilihan dari orang tersebut.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan-hambatan yang berasal dari luar masyarakat yang dibagi menjadi:

- a) Pengaruh Kemiskinan
Kemiskinan merupakan faktor mendasar yang menghambat jalannya partisipasi politik karena seseorang akan berpikir lebih banyak hal yang menguntungkan dirinya.
- b) Pola Masyarakat Yang Heterogen
Heterogen merupakan perbedaan pola masyarakat yang menimbulkan persaingan dan prasangka dalam sistem yang ada sehingga berpengaruh dalam kegiatan partisipasi politik.

3.4 Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Untuk Pemilihan Umum yang akan Datang

1. Weakness (Kelemahan)
 - a. Kurangnya sosialisasi KPU
 - b. Kurangnya program KPU untuk mendukung pemilihan umum
 - c. sosialisasi yang diberikan KPU kurang menarik
2. Strengths (Kekuatan)
 - a. KPU kabupaten Tengah Utara memiliki Relawan Demokrasi
 - b. Internal KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat memanfaatkan media sosial.
3. Threats (Ancaman)
pola pikir masyarakat dalam politik masih dipengaruhi oleh keluarganya.
4. Opportunities (Peluang)
Mampu bekerjasama dengan tokoh masyarakat di setiap desa di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat karena para tokoh masyarakat ini lebih didengarkan oleh masyarakat maka partisipasi akan meningkat.

1. Strategi S-O

Strategi S-O merupakan strategi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal guna memperoleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi di Kabupaten Timor Tengah Utara

2. Strategi W-O

Strategi W-O merupakan strategi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalisir kelemahan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat

3. Strategi S-T

S-T merupakan strategi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat

4. Strategi W-T

Strategi W-T merupakan strategi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilakukan untuk meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman yang ada agar tingkat partisipasi politik meningkat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan tingkat partisipasi yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Pertama, faktor sosial ekonomi berupa rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi politik di kabupaten Timor Tengah Utara yaitu karena berdasarkan hasil wawancara dan juga data yang ada pemahaman masyarakat TTU mengenai politik akan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Selain itu kuatnya pengaruh keluarga juga mempengaruhi tingkat partisipasi politik di kabupaten Timor Tengah Utara karena berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Timor Tengah Utara sendiri kebiasaan anggota keluarga akan mengikuti keturtsertaan kepala keluarganya sehingga saat kepala keluarganya tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum yang berlangsung maka anggota keluarga yang lain juga akan turut pasif dalam kegiatan tersebut.

Kedua, tingkat pengetahuan politik berupa minimnya komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dan faktor kurangnya pemahaman modernisasi sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik di kabupaten Timor Tengah Utara karena menurut data dan wawancara yang telah dilakukan penulis ialah Dimana pada 2020 lalu terjadi pandemi covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan dalam segala hal salah satunya ialah komunikasi. Dari hal tersebutlah komunikasi pada pemilihan umum 2020 lalu sangat kurang karena tidak dilaksanakan secara langsung atau tatap muka selain itu modernisasi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Timor Tengah Utara terutama dalam bidang teknologi dimana masyarakat TTU belum sepenuhnya bisa menerima modernisasi dengan baik dan belum bisa dengan baik juga menjalankannya. Sehingga masyarakat Timor tengah Utara menjadi tertinggal dalam informasi yang bersifat online pada pemilihan umum tahun 2020 lalu yang dikarenakan pandemic covid-19.

Strategi yang disiapkan oleh KPU sesuai dengan hasil penelitian penulis menggunakan Analisa SWOT ialah dengan Menggunakan Relawan Demokrasi KPU membantu mensosialisasikan kegiatan pemilu, membuat program dengan salah satunya memanfaatkan Relawan Demokrasi yang ada, Membuat sosialisasi yang menarik dan baru untuk menarik minat masyarakat selain itu juga KPU akan Memperbanyak sosialisasi mengenai pemilu, Membuat program-program yang dapat mengatasi penyebab rendahnya partisipasi dan Mengubah metode sosialisasi menjadi lebih menarik yang dimana diharapkan dengan strategi ini dapat meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan umum yang akan datang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat Partisipasi Politik masyarakat Timor Tengah Utara dalam Pemilihan umum pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2015. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat Timor Tengah Utara pada pemilihan umum tahun 2020 adalah kurangnya dukungan dari pihak terkait mengenai pendidikan politik masyarakat, besarnya pengaruh keluarga dalam kegiatan politik anggota keluarga termasuk dalam pemberian suara dalam pemilihan umum, keterbatasan komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat, Kurangnya kemampuan masyarakat dalam menerima modernisasi yang terjadi., serta anggapan masyarakat mengenai berpengaruh tidaknya hasil Pemilihan Umum terhadap pekerjaannya.

Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut upaya serta strategi yang disiapkan oleh KPU sebagai Lembaga penyelenggara yang bertanggung jawab atas keberlangsungan pemilihan umum di Kabupaten Timor Tengah Utara ialah dengan membuat program dengan memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai Relawan Politik yang ada di desa-desa untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat desanya tentang politik, memanfaatkan sosial media sebagai sarana informasi kepada masyarakat tentang pemilu, menyajikan sosialisasi lebih menarik untuk menarik minat masyarakat serta meminimalisir hambatan pada persiapan Pemilihan Umum

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penyebab dari rendahnya partisipasi politik pada pemilihan umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara, dan semua pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Budoardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Bandung. Buana Book Star.

Labolo, Muhadam dan Teguh, Ilham., 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers Sugiyono, Prof. Dr. 2017. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung. CV. Alfabeta

Rangkuti, Freddy. 2018. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Cetakan Kedua puluh Empat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018.

Gosango, Rosnia. 2010. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halamahera Utara Tahun 2010: Skripsi. Manado: FISIP UNSRAT

[Tim tribunews. Daftar 270 daerah yang gelar pilkada serentak 2020. Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020 pada Rabu, 9 Desember 2020, Adakah Daerahmu? - Tribunews.com \(diakses pada 11 september 2021\)](#)

[Tim liputan6.com, Kesbangpol kabupaten TTU adakan sosialisasi terkait pilkada serentak 2020 mendatang . https://www.timor-media.com/2019/04/02/kesbangpol-ttu-dongkrak-peningkatan-partisipasi-politik-melalui-sosialisasi/ \(diakses pada 13 september 2021\)](#)

[Data suara dalam pemilu 2015 dan 2020 kabupaten TTU](#)

[https://kupang.tribunnews.com/2020/12/17/partisipasi-pemilih-pada-pilkada-ttu-tahun-2020-tidak-sesuai-dengan-target-nasional](#)

[https://pilkada2015.kpu.go.id/ttukab \(diakses tanggal 06 september 2022\)](#)

